

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMKOT SURABAYA
DALAM PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010**

Gita Desipradani¹, Zeni Rusmawati²
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRACT

Changes in the field of government accounting should be based on a strong foundation that is with the Government Accounting Standards (SAP). With the issuance of PP No.71 Year 2010 on SAP can be used to produce a reliable financial report and can be used as benchmarks and standards in decision making within the scope of government. The presentation of financial statements in accordance with SAP is useful for the creation of accountability and transparency of government financial management. This study aims to find out how the presentation of the financial statements of the Government of Surabaya City in the application of PP. 71 Year 2010 as well as accountability and transparency of presentation of financial statements of Surabaya City Government. The research method used descriptive qualitative. The result of this research, presentation of financial report of Surabaya City Government has been made based on PP. 71 Year 2010, although the constraints occurred in the process of presentation, but the accountability and transparency of the Government of Surabaya is useful in making decisions for those who need local financial information.

Keywords : Presentation of Financial Statement, PP. 71 Year 2010, Accountability, Transparency

Correspondence to : gitadesip@gmail.com, u_zeni@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP dapat digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal serta dapat dijadikan patokan dan standar dalam pengambilan keputusan dalam lingkup pemerintahan. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP bermanfaat untuk terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 serta akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya sudah dibuat berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, meskipun kendala terjadi dalam proses penyajiannya, namun akuntabilitas serta transparansi keuangan Pemerintah Kota Surabaya bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan daerah.

Kata kunci : Penyajian Laporan Keuangan, PP No. 71 Tahun 2010, Akuntabilitas,Transparansi

Korespondensi : gitadesip@gmail.com, u_zeni@yahoo.co.id

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Perubahan penyajian laporan keuangan Pemerintahan dari berbasis kas menjadi akrual, seharusnya lebih banyak memberikan informasi keuangan Pemerintahan yang dibutuhkan *public*. Namun, masih banyak penafsiran maupun hal teknis yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Secara sederhana akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas serta tidak mencatat aset dan kewajiban. Sebaliknya, akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) serta mencatat aset dan kewajiban.

Basis akrual diterapkan sebagai dasar pencatatan laporan keuangan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi penggunaannya, baik pemerintah, masyarakat, maupun semua pihak-pihak lain yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Dengan adanya berbagai manfaat yang ditawarkan dalam penerapan basis akrual pada entitas pemerintah, beberapa negara di dunia sedang berupaya mengaplikasikannya. Beberapa penelitian menyebutkan, akuntansi berbasis akrual mempunyai berbagai kendala antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas (Agnes, 2015). Namun dengan sistem pengendalian intern yang memadai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83% (Tuti, 2014)

Berbagai pilihan penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang masih menggunakan perpaduan *accrual basis* dan *cash basis*, akan mengundang tekanan dari berbagai pihak, baik penyusun maupun para pengguna dari laporan keuangan untuk mendapatkan

informasi keuangan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sarana teknologi informasi dalam penerapannya. Dengan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 diharapkan akan mengurangi berbagai kendala dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan sehingga informasi keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan transparan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selain menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, juga menerapkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Pentingnya informasi keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, dengan masih diberlakukannya perpaduan *accrual basis* dan *cash basis*, maka peneliti ingin mengetahui penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menurut PP No. 71 Tahun 2010 serta akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah, (1) masyarakat, (2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses

donasi, investasi dan pinjaman, (4) Pemerintah.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut (1) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan (2) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran (3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai (4) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya (5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman (6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mahmudi (2010: 11) menyatakan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut (1) Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. (2) Andal (*Reliability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus

dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. (3) Dapat dibandingkan (*comparability*), artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis. (4) Dapat dipahami (*understandability*), artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Menurut PP 71 Tahun 2010

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan keuangan Pemerintah terdiri atas 7 laporan, yaitu (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (3) Neraca (4) Laporan Operasional (LO) (5) Laporan Arus Kas (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/ABPD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Unsur-unsurnya yaitu pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau

oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut, (1) Saldo Anggaran Lebih awal (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya (5) Dan lain-lain (6) Saldo Anggaran Lebih Akhir. Laporan Perubahan Saldo Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos (1) Ekuitas awal (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: (a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya (b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap (4) Ekuitas akhir. Selain itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan

Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Berdasarkan PSAP No. 11 Paragraf 6 dikatakan laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai entitas tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca Saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (*worksheet*) konsolidasian dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan, yaitu : (1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), jurnal penutup LRA, Neraca saldo setelah penutupan (2) Menyusun Laporan Operasional (LO), jurnal

penutup, neraca saldo setelah penutup (3) Menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir dan neraca saldo akhir (4) Menyusun Laporan Perubahan SAL (5) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (6) Menyusun Laporan Arus Kas (7) Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntabilitas dan Transparansi menurut PP No. 71 Tahun 2010

Akuntabilitas artinya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi artinya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain Cristy Sopotan, dkk (2015) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 belum sesuai dengan SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010, tetapi pemprov Sulut telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran berikutnya. Sebaiknya pimpinan Pemprov Sulut menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun selanjutnya dengan menyajikan secara lengkap 7 Laporan Keuangan, yaitu Neraca, LRA, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan CALK, serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

dalam menghasilkan laporan keuangan. Ezra Paula Mentu, dkk (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Penelitian Tuti Herawati (2014) tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada perangkat daerah Pemda Cianjur menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%.

Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri (2012) menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan 10 variabel (umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan, daerah, dan pembiayaan utang). Hasil penelitiannya menunjukkan karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pengungkapan LKPD, sedangkan *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan Daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil penelitian Wiwik Andriani (2010) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan) membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung. Kapasitas sumber daya manusia mempunyai nilai capaian yang tinggi yaitu sebesar 48,10% sedangkan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 38,30% berdasarkan pengolahan data statistik sehingga dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai yang tinggi yaitu sebesar 61,60%. Nilai ini sangat mempengaruhi ketepatanwaktuan terhadap pelaporan keuangan pemda, sedangkan kapasitas sumber daya manusia hanya sebesar 4,9%. Sehingga dikatakan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintah daerah.

Devi Roviyantie (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh SDM bagian keuangan/akuntansi pembuat laporan

keuangan daerah setiap Dinas sudah kompeten, serta Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah diterapkan dengan baik, sehingga Kualitas Laporan Keuangan Daerah setiap Dinas pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan baik. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di setiap Dinas. Karena jika SDM tidak memahami akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah, maka sangat sulit Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik. Secara parsial Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ketika sejak awal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik. Penelitian Amiruddin Zul Hilmi dan Dwi Martani (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2006-2009. Berdasarkan pengujian dan analisis dalam penelitian ini, Tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi masih rendah. Tetapi tren tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terus meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi memiliki kekayaan yang lebih besar yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Variabel tingkat ketergantungan dan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Dalam kategori kompleksitas pemerintahan, jumlah penduduk berpengaruh positif. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan Pemda. Sedangkan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dalam kategori Hasil Pemeriksaan BPK, tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Semakin besar tingkat penyimpangan yang ditemukan oleh BPK maka semakin besar tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan BPK mendorong pemerintah provinsi untuk mengungkapkan lebih besar berdasarkan hasil audit BPK tersebut. Sedangkan jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Warih Komarasari (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan, mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN / METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian membahas tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun 2015 dan manfaat akuntabilitas dan transparansi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan pengamatan peneliti sebagai orang luar (*outside observation*). Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi dan digambarkan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN / RESULTS

Deskripsi Objek Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya berada di kompleks kantor Pemerintah Kota Surabaya Jl. Jimerto Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah merupakan instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah kota surabaya. BPKPD Kota Surabaya menangani 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya.

Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang terdiri atas (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (3) Neraca (4) Laporan Operasional (LO) (5) Laporan Arus Kas (6) Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggunakan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggunakan basis akrual.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemkot Surabaya

Proses penyusunan laporan keuangan Pemkot Surabaya dilakukan secara bertahap. Setiap 3 bulan sekali, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan rekonsiliasi dengan Pemkot Surabaya. Rekonsiliasi laporan keuangan yang dilakukan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Rekonsiliasi ini, sebagai alat kontrol dari Pemkot Surabaya ke masing-masing SKPD dan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahunan yang diserahkan ke BPK. Laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkot Surabaya, disebut juga sebagai laporan keuangan konsolidasi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya, yang mengatakan :
 “.....dari laporan keuangan masing-masing SKPD kita menyusun laporan keuangan tahunan, jadi kita mengkompilasi laporan keuangan dari SKPD menjadi laporan keuangan PEMKOT. Setiap 3 bulan sekali, kita melakukan rekonsiliasi, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional (akrualnya itu). Mulai efektif mulai tahun 2016, berdasarkan hasil dari pemeriksaan BPK tahun 2015, badan pengelola keuangan kota surabaya ini, direkomendasikan oleh BPK untuk menyusun aplikasi tentang administrasi persediaan.

Jadi sekarang ini, rekonsiliasi yang dilakukan Pemkot plus rekonsiliasi persediaan. Rekonsiliasi persediaan ini bermanfaat untuk penyusunan bahan neraca Pemkot untuk akhir tahun. Selama ini, SKPD-SKPD hanya memberikan ke kami bahan neraca yang isinya meliputi piutang nya berapa, hutang nya berapa, persediannya berapa, dsb”.

Proses penyusunan laporan keuangan Pemkot Surabaya menggunakan program online dan manual, hal ini didukung dengan hasil wawancara :

“kalau untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan persediaan kita lakukan penyusunan secara online, sedangkan untuk penyusunan neraca, masih menggunakan manual, jadi dari print out, diserahkan ke kami, lalu kita cocokkan juga dengan sistem di aplikasi itu (e-accounting), terus nanti kita sajikan dalam bentuk laporan keuangan”.

Beberapa kendala juga terjadi dalam proses rekonsiliasi maupun proses penyusunan bahan pembuatan neraca, yaitu masih adanya SKPD yang terlambat melakukan rekonsiliasi atau terlambat dalam pengumpulan bahan untuk pembuatan neraca, terutama data tentang masalah aset, hal ini diungkap :

“.....itu juga salah satu kendala, seringnya kendalanya itu, bukan karena mereka males gitu ya, cuma kadang kalau tidak cocok (selisih) nominalnya, otomatis kan butuh waktu, kadang sudah dikejar deadline, ini sehari kita selesaikan. Terus kalau selama ini sih, misalnya kalau rekonsiliasi, terus ada beberapa SKPD yang belum membuat atau belum jadi berita acaranya, sudah deadline belum jadi juga berita acaranya, biasanya sih kami laporkan kepada kepala bidang kami. Kendala lainnya yang selalu saja jadi masalah itu adalah masalah aset. Aset itu kan, kalau disini kan dibagian perlengkapan yang ngurusin, seringnya itu kita nunggu-

nunggu data aset itu, sampai hampir deadline, itulah yang bikin spot jantung”.

Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya

Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya telah menggunakan berbagai aplikasi keuangan, seperti aplikasi e-accounting untuk akuntansi, e-inventory untuk persediaan, e-simbada untuk barang (aset). Berikut petikan wawancara peneliti dengan Kepala Sub Dit Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya,

“Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kita sudah basis web, kita sudah punya aplikasi e accounting untuk akuntansi, e inventory untuk persediaan, e simbada untuk barang. Penyajian laporan keuangan di e accounting ada basis akrual dan basis cash. Yang cash basis seperti Laporan Realisasi Anggaran, kita bisa bantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), angka kita bisa online, jadi SKPD tidak perlu double input. Tapi untuk basis akrual, otomatis itu mengandalkan skil akuntansi. Disini subdit akuntansi, mensupervisi, kita mendampingi, membimbing, SKPD untuk penjurnalan dari Laporan Operasional.

Selanjutnya beliau menambahkan, “Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, menggunakan accrual basis, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggunakan cash basis. Semuanya online. Namun untuk proses penjurnalan harus manual, seperti piutang, berarti harus dilihat, SKPD nya sudah terima belum, jurnal penyisihannya bagaimana, kalau terima kas, transfer antar barang, transfer persediaan, itu memang harus mengandalkan skill akuntansi. Untuk penginput an secara online, kita bisa memantau jurnal nya benar atau tidak by online’..

Penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya yang berbasis *accrual*, memerlukan banyak pelatihan maupun sosialisasi kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah lingkup Pemerintahan Kota Surabaya. Ada 72 SKPD dengan karakteristik yang berbeda – beda, sehingga Pemkot Surabaya menerapkan *treatment* khusus untuk masing-masing SKPD dalam menunjang proses penyajian laporan keuangan Pemkot. Berikut petikan wawancaranya,

“.....Pekot kan ada Dinas Pendidikan, mereka punya BOPDA, BOS, Dinkes ada istilahnya, dana kapitasi, trus Rumah Sakit ada BLUD, karakter2 seperti itu, kalau teman2 disini kurang paham akuntansi dan kalau tidak bisa memanage, itu komplikasi nya bisa ke laporan keuangan Pemkot. Kalau bicara tingkat kesulitan, Standar Akuntansi Pemerintah lebih sulit, istilahnya kita bicara SKPD dengan masing-masing karakteristik berbeda, misalnya Dinas Kesehatan beda dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), PU berbeda dengan Cipta Karya, Cipta Karya beda dengan Dinsos, harus disatukan dalam laporan keuangan Pemkot, seni nya disitu”.

“rata-rata kemampuan akuntansi masing-masing SKPD tidak merata, ada yang pintar, sedang dan standarnya di bawah, nah kita klasifikasikan mana SKPD yang memang kita harus full disitu atau perhatian terutama untuk SKPD yang kurang, karna kemampuan akuntansi tiap SKPD memang beda”.

“.....kita bicara *treatment* nya berbeda, termasuk persediaan kan beda-beda. Persediaan mana yang paling banyak, dan mana yg perlu diperhatikan, seperti Dinas Kesehatan, mereka lebih diperhatikan ke persediaan obat2an, Dinas Pekerjaan Umum (PU) persediaan aspal. Permendagri No 64 Tahun 2013 telah mengatur tentang penggunaan akun untuk masing-masing transaksi, cuma kan ada yang dipakai ada yang ngga, tergantung SKPD nya, angka2

seperti itu yang kita gabungkan dalam laporan keuangan, kita konsolidasikan”.

Laporan Keuangan Tahunan Pemkot Surabaya, harus diserahkan tepat waktu kepd Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi ada saja kendala dari SKPD dalam penyerahannya ke Pemkot, terutama kemampuan Sumber Daya Manusia yang mengerjakan proses tersebut, meskipun Pemkot telah mengadakan pelatihan/sosialisasi maupun proses pendampingan dan koreksi secara intens kepada masing-masing SKPD, ini diungkapkan dengan hasil wawancara,

“*pendampingannya tiap hari, kita kan basis web, jadi kita bisa lihat UPD, gimana menginputnya? Kalau ada kesulitan, bisa komunikasi dengan penyeliannya, dia terima transaksi ini jurnalnya seperti apa, kita juga ada rekon tiap 3 bulan, kita cutt off, akhir maret, Laporan Realisasi Anggaran pun meskipun cash basis dan sudah by sistem mulai dari e-budgeting sampai e-accounting, tapi kita juga membantu untuk mengoreksi, mereka sdh betul apa tidak, kita bisa pantau jurnalnya betul apa tidak. Maret rekonnya di April, Juni rekonnya di Juli, dst.*

“*kalau mau jujur, banyak yang belum paham, jadi teman-teman Sub Dit Akuntansi harus extra mendampingi. Kalau kita bicara akrual, kalau salah penjurnalan, kan bisa ndak balance neracanya, Laporan Operasional nya salah, nah itu yang kita pantau, dan kita harus bantu koreksi, kalau satu salah otomatis seluruhnya salah”.*

Beliau menambahkan, “.....tahun 2016 ada SKPD yang terlambat menyerahkan rekonsiliasi dan bahan pembuatan neraca, kita panggil, ngerjakan di kantor sini, harus selesai, kalau perlu nginap disini. Kalau kita bicara *accrual*, kita bicara laporan keuangan konsolidasi, dengan kemampuan masing-masing SKPD yang tidak merata, bagaimanapun caranya agar laporan keuangan PEMKOT itu jadi”.

Untuk mengatasi hal tersebut beberapa SKPD merekrut beberapa orang tenaga *outsourcing* akuntansi, dalam rangka membantu proses penyajian laporan keuangan yang diminta oleh Pemkot Surabaya. Namun, latar belakang pendidikan tenaga *outsourcing* yang akuntansi komersil, juga membuat Pemkot memberikan *treatment* kepada tenaga *outsourcing* SKPD itu agar memahami akuntansi pemerintahan berbasis akrual, berikut petikan wawancara nya,

“ tergantung kebutuhan, rata-rata SKPD punya *outsourcing* yang paham akuntansi, karna beda Standar Akuntansi Pemerintah dengan Standar Akuntansi Komersil, *treatment*nya berbeda, maka kita beri pemahaman supaya langsung klop dengan kita. Karna latar belakang pendidikan mereka adalah basic akuntansi komersil”,.....” di SKPD yang menjurnal kan bendahara-bendahara, dan mereka rata-rata pemahaman akuntansi nya kurang, maka perlu *outsourcing*, tapi ada juga yang tidak menggunakan *outsourcing*, dan kita memahami masing-masing SKPD ada yang pakai *outsourcing* ada yang nggak, intinya mau pakai apa tidak, laporan keuangan harus jadi dan harus benar”.

Pemkot Surabaya dalam penyajian laporan keuangan nya juga dibantu oleh tenaga *outsourcing* dengan latar belakang pendidikan akuntansi maupun *programmer* komputer, ini hasil wawancaranya,

..... “trus kita dibantu dengan *outsourcing* ada 9 orang, yang *programmer* nya ada 3 orang, jadi yang pegang akuntansi 6 orang”. Beliau menambahkan, “masing-masing staf di BPKAD yang PNS sejumlah 7 orang termasuk saya, rata-rata menangani 7 – 8 SKPD. Nanti tergantung kemampuan masing2 staf, semakin dia senior, semakin memahami akuntansi, beban UPD yang harus dipenuhi, memang lebih berat, soalnya di Pemkot kan juga ada Dinas Pendidikan,

mereka punya BOPDA, BOS, Dinkes ada istilahnya, dana kapitasi, trus RS ada BLUD, karakter2 seperti itu, kalau teman2 disini kurang paham akuntansi dan kalau tidak bisa *manage*, itu komplikasi nya bisa ke laporan keuangan Pemkot”.

Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemkot Surabaya

Secara internal maupun eksternal manfaat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemkot Surabaya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Di pihak internal, laporan keuangan Pemkot yang berbasis akrual dengan sistem online, memberikan kemudahan dalam hal *control* maupun efektivitas waktu dalam penyusunannya, meminimalisir kesalahan, karena dengan basis online, Pemkot Surabaya bisa setiap saat mengetahui bagaimana aktivitas SKPD dalam menyusun laporan keuangannya, sekaligus segera bertindak untuk melakukan koreksi, apabila terjadi kesalahan dalam penjurnalan atau terjadi selisih nominal. Pemkot Surabaya juga terbuka dalam menyampaikan transparansi laporan keuangannya kepada pihak eksternal, seperti masyarakat, LSM, investor, melalui webiste Pemkot Surabaya. Akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin bagus, mencerminkan kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

PEMBAHASAN / DISCUSSION

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Kota Surabaya sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Namun masih terdapat kendala dalam proses penyusunannya, terutama masalah sumber daya manusia (SDM) yang berada di 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum terlalu memahami akuntansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan karena latar belakang pendidikan tenaga akuntansi tersebut adalah akuntansi komersial yang berbeda dengan ilmu akuntansi pemerintahan,

Akuntabilitas Pemkot Surabaya dapat diketahui dari alat kontrol berupa aplikasi keuangan yang setiap saat dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana aktivitas SKPD dalam menyusun laporan keuangannya, sekaligus segera bertindak untuk melakukan koreksi, apabila terjadi kesalahan dalam penjumlahan atau terjadi selisih nominal. Transparansi Pemkot Surabaya tercermin dalam penyajian laporan keuangan yang dapat diakses melalui webiste Pemkot Surabaya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Cristy Sopotan, dkk (2015) dengan judul Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 belum sesuai dengan SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010, tetapi pemprov Sulut telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran berikutnya. Sebaiknya pimpinan Pemprov Sulut menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun selanjutnya dengan menyajikan secara lengkap 7 Laporan Keuangan, yaitu Neraca, LRA, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan CALK, serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin dalam rangka

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan.

Dari hasil penelitian Ezra Paula Mentu, dkk (2016) dengan judul Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulut menunjukkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Dari hasil penelitian Wiwik Andriani (2010) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan) membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung. Kapasitas sumber daya manusia mempunyai nilai capaian yang tinggi yaitu sebesar 48,10% sedangkan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 38,30% berdasarkan pengolahan data statistik sehingga dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan meningkatkan

ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai yang tinggi yaitu sebesar 61,60%. Nilai ini sangat mempengaruhi ketepatanwaktuan terhadap pelaporan keuangan pemda, sedangkan kapasitas sumber daya manusia hanya sebesar 4,9%. Sehingga dikatakan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian Warih Komarasari (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan, mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang terdiri atas (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (3) Neraca (4) Laporan Operasional (LO) (5) Laporan Arus Kas (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggunakan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggunakan basis akrual.

Kendala dalam proses penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya terutama pemahaman sumber daya manusia (SDM) tenaga akuntansi tentang akuntansi pemerintahan yang masih memerlukan pendampingan, ternyata tidak mempengaruhi dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemkot Surabaya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diantisipasi dengan banyaknya aplikasi keuangan yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Surabaya (BPKPD) untuk SKPD yang bermanfaat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemkot Surabaya, dengan menciptakan aplikasi berupa *e-accounting* untuk akuntansi, *e-inventory* untuk persediaan, *e-simbada* untuk barang (aset) memberikan kemudahan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi antara SKPD dengan Pemkot. Hal ini juga diapresiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan rekomendasi kepada Pemkot untuk membuat aplikasi *e-inventory* untuk menangani persediaan tahun 2016. Akun persediaan dengan penafsiran 72 SKPD, tentu memerlukan waktu yang lama dalam proses laporan keuangan konsolidasi. Diharapkan dengan adanya *e-inventory* akan mengurangi kendala penafsiran tentang akun persediaan di masing-masing SKPD, sehingga mempercepat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara SKPD dengan Pemkot Surabaya.

KESIMPULAN / CONCLUSION

Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
2. Kendala dalam proses penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya terutama

- pemahaman sumber daya manusia (SDM) tenaga akuntansi tentang akuntansi pemerintahan yang masih memerlukan pendampingan, ternyata tidak mempengaruhi dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemkot Surabaya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemkot Surabaya, dengan menciptakan aplikasi berupa *e-accounting* untuk akuntansi, *e-inventory* untuk persediaan, *e-simbada* untuk barang (aset) memberikan kemudahan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi antara SKPD dengan Pemkot.
 4. Akuntabilitas Pemkot Surabaya dapat diketahui dari ketepatan waktu Pemkot Surabaya menyampaikan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2015. Transparansi Pemkot Surabaya tercermin dalam penyajian laporan keuangan yang dapat diakses melalui webiste Pemkot Surabaya.

Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah perlunya menganalisis kembali kebutuhan tenaga akuntansi untuk instansi pemerintah, terutama latar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan akuntansi sektor pemerintah daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah, diperlukan penelitian lanjutan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar diketahui kendala yang terjadi di lingkungan SKPD tentang penyusunan penyajian laporan keuangan, agar penelitian tentang laporan keuangan pemerintah daerah

lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY

- Andriani, W. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)*. Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 69-80.
- Cristy Soputan, et. el. 2015. *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 592 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 592-600.
- Devi Roviyantie. 2011. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Siliwangi.
- Erlina. 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta : Salemba Empat
- Ezra Paula Mentu, et. el. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulut*. Jurnal EMBA 1399 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1392-139.
- Herawati, T. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 2014.

- Hilmi, AZ dan Martani D. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi*. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Komasari, W. 2017. *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)*. Prodi Akuntansi UPY, 2017 - repository.upy.ac.id.
- Lelono dan KM. Joko. 2014. *“Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis AkruaI pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga)”*. Salatiga: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Setyaningrum, D dan Febriyani S. 2012. *Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 9 Nomor 2, Desember 2012.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.